

EVALUATION OF LIFE SKILLS EDUCATION BASED NONFORMAL EDUCATION FOR POVERTY REDUCTION IN RURAL

By:

Yoyon Suryono & Entoh Tohani

*NONFORMAL EDUCATION DEPARTMENT, FACULTY OF EDUCATION
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY*

ABSTRACT

This research aims to know effectiveness of implementation of life skills education program in rural area which is viewed of the outcome aspect to poverty reduction, partnership on the program implementation, and prospective development to the future. The research which is done in three regencies in Province of The Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) namely Gunung Kidul, Kulon Progo, and Bantul regency. It used the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model of evaluation which has developed by Stufflebeam. The model of evaluation applied to implementation of life skills education program which has run to empowering the poor people in the regencies. The result of study shows that effectiveness rate of implementation of the programs are more focused on skills/practical education and is not optimal yet especially viewed of output and outcome component for achieving job and developing entrepreneurship in income generating of family and community. Partnership on implementation of the program is implemented good enough, but the result is not effects optimally to poverty reduction. To develop the program, it is need to improvement and innovating about everything deal with levels or steps of the management of the program consist of planning program level, implementation program level, and monitoring and evaluation program level.

Key Words : Life skills, Nonformal Education, Evalution, Poverty Reduction

PENDAHULUAN

Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui penyelenggaraan program pendidikan nonformal, telah dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang ditujukan pada individu, kelompok, dan/atau masyarakat. Program-program pendidikan nonformal bagi

masyarakat miskin yang ada di masyarakat pada dasarnya dilaksanakan untuk memenuhi keragaman kuantitas dan kualitas kebutuhan masyarakat miskin. Program-program tersebut banyak dikembangkan oleh pemerintah misalnya melalui Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Sosial, dll, yang wujudnya dapat berupa program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), program kesehatan, program pemberdayaan perempuan, program keagamaan, program rehabilitasi bencana alam, penyuluhan masyarakat pertanian, dan sebagainya.

Program pendidikan nonformal menjadi alat untuk membekali warga masyarakat dengan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya dan kehidupan warga masyarakat yang lebih luas. Hal ini dapat berarti bahwa program pendidikan nonformal yang diselenggarakan merupakan konsekuensi dari akibat perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang memerlukan antisipasi dan penyesuaian.

Kenyataan dalam masyarakat, pelaksanaan program pendidikan nonformal khususnya program pendidikan kecakapan hidup, tidak jarang kurang dapat memberikan manfaat kepada kelompok sasaran maupun masyarakat lingkungan sekitar sehingga pengembangan masyarakat yang diharapkan tidak dapat tercapai secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh pengelolaan program pendidikan tersebut yang dilakukan selama ini kurang memperhatikan kemampuan masyarakat sasaran tetapi lebih didominasi dengan pengelolaan *top down* sehingga pelaksanaan program pendidikan

kecakapan hidup bersifat parsial, jauh dari rasa memiliki masyarakat, dan kurang adanya kesepakatan bersama sehingga kelompok sasaran tidak merasa memiliki. Bahkan masyarakat miskin memiliki kesempatan yang kecil untuk memberikan kontribusinya terhadap program pemberdayaan masyarakat khususnya program pendidikan kecakapan hidup secara terbuka tanpa ada merasa terasing dan terpaksa.

Pada aspek lain, penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup idealnya berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Namun, dalam realita diketahui bahwa di masyarakat pengelolaan program pendidikan nonformal ada yang telah mencapai tahap inovasi (*innovation*), dimana program pendidikan dilakukan dengan baik sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkembang terus-menerus dengan cara-cara yang lebih inovatif. Program pendidikan kecakapan hidup juga ada yang mencapai tahap peningkatan (*improving*), dimana program pendidikan dijalankan tidak sekedar mengacu pada perencanaan awal atau pentunjuk pelaksanaan yang sifatnya rutin, namun sudah dilakukan dengan tindakan-tindakan yang tidak rutin dan fleksibel. Selain itu, juga terdapat program pendidikan kecakapan hidup yang berada pada tahap implementasi (*implementation*) saja, dimana program diselenggarakan hanya mengacu pada petunjuk pelaksanaan bahkan hanya sekedar beroperasi. Adanya perbedaan pengelolaan program kecakapan hidup tersebut menggambarkan bahwa diperlukan upaya untuk mengembangkan kualitas program juga kemampuan

pengelola program agar mampu mengelola program dengan lebih baik sehingga akhirnya terbentuk program yang berkelanjutan.

Terkait dengan hal di atas, penelitian ini dipandang perlu dilakukan untuk mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup yang ada di dalam berbagai program pendidikan nonformal secara terintegrasi, yang dibatasi pada masalah: 1) Bagaimana efektivitas program kecakapan hidup pada berbagai program pendidikan nonformal dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan?, 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh program pendidikan nonformal berbasis kecakapan hidup dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan?, 3) Bagaimana sinergitas pelaksanaan program pendidikan nonformal berbasis kecakapan hidup dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan?, dan 4) Bagaimana pengembangan model program pendidikan nonformal berbasis kecakapan hidup yang ada di masyarakat untuk waktu yang akan datang?

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi atau fakta yang menggambarkan efektivitas, dampak, dan sinergitas penyelenggaraan program pendidikan nonformal dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan, dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terkait bergerak dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya pemerintah, juga bagi praktisi pemberdayaan, tokoh masyarakat dan lembaga swasta sehingga mampu membangun program-program pemberdayaan (khususnya program pendidikan kecakapan hidup dan program pendidikan nonformal) yang memiliki kesesuaian dan feasibilitas

yang baik, sekaligus menjadi sumber informasi bagi praktisi pendidikan nonformal untuk pengembangan disiplin keilmuan yang berkait dengan pengentasan kemiskinan di pedesaan..

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Coomb (1985:10) pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan (belajar) warga masyarakat dimana kebutuhan pendidikan sangat beragam, dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian, meningkatkan kesejahteraan hidup, membangun kehidupan sosial yang dinamis, dan terwujudnya kehidupan berpolitik yang partisipatoris.

Pendidikan nonformal mencakup pendidikan *para-formal* (*para-formal education*), pendidikan popular, pengembangan pribadi, pelatihan vokasional dan profesional, keaksaraan dengan pengembangan keterampilan, dan program pendidikan nonformal *supplementary* (Hoppers, 2006). Sedangkan dalam konteks kemiskinan di pedesaan, Coomb (1985:10) menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan nonformal mencakup program penyuluhan pertanian dan pelatihan kaum petani, program "melek huruf" bagi orang dewasa, pelatihan

keterampilan kerja yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, perkumpulan remaja dengan tujuan pendidikan, dan berbagai program pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan, gizi, keluarga berencana, koperasi dan lain sebagainya.

Pencapaian tujuan pendidikan yang diemban pendidikan nonformal dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program pendidikan nonformal yang dilaksanakan di satuan pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pesantren, dan lembaga kursus, dan lembaga pelatihan yang didasarkan pada lingkup kegiatan dan jenis pendidikan nonformal. Program-program pendidikan nonformal perlu diselenggaraan secara tepat sesuai karakteristik kelompok sasaran, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. (Zaenudin Arief, 2002).

Salah satu wujud program pendidikan nonformal adalah pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*). Kecakapan hidup (*life skills*) sendiri diartikan sebagai suatu keterampilan yang dipelajari untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kecakapan hidup merupakan kebisaan-kebisaan yang mana setiap individu dapat mempelajari yang akan menolong mereka guna mengingkatkan mutu kehidupannya. Menurut Francis, M. bahwa *life skills is as “skills that help an individual be successful in living a productive and satisfying life”*(www.changingminds.org). Kecakapan hidup adalah kemampuan yang dapat menolong individu menjadi berhasil dalam kehidupan yang produktif dan memuaskan.

WHO (1997) menyatakan bahwa kecakapan hidup adalah keterampilan/kecakapan yang menolong seorang individu menjadi berhasil dalam kehidupan yang sejahtera dan produktif. Makna kecakapan hidup adalah kebiasaan bagi tingkah laku positif dan adaptif yang memungkinkan setiap individu berhubungan secara efektif dengan permintaan (kebutuhan) dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal serupa dikemukakan Depdiknas (2003) bahwa kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar, tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya.

Dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia yang diarahkan pada pencapaikan mutu dan relevansi pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional (2003) mengelompokkan empat kecakapan hidup yaitu: 1) kecakapan pribadi (*personal skill*), yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berfikir rasional dan percaya diri, 2) kecakapan social (*social skill*) seperti kerja sama, bertenggang rasa dan tanggung jawab sosial, 3) kecakapan akademik (*academic skill*) seperti kecakapan dalam berfikir ilmiah, melakukan penelitian, dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah, dan 4) kecakapan vokasional (*vocational skill*) adalah kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat seperti di bidang jasa dan produksi barang tertentu. Kecakapan hidup perlu dibentuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang dilandasi prinsip empat pilar pendidikan, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan, yang

diikuti oleh belajar untuk mengetahui cara belajar, belajar untuk melakukan pekerjaan, belajar agar dapat menjadi orang yang berguna dan belajar untuk hidup bersama dengan orang lain.

Mendasarkan pada beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi masalah-masalah hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa cemas, tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Kecakapan hidup perlu dikuasai oleh setiap warga masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan yang mengandung berbagai persaingan yang ketat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Kecakapan hidup harus mampu dibentuk dan dimiliki oleh segenap masyarakat baik individu maupun masyarakat yang beruntung (*the have*) maupun mereka yang miskin (*the poor*). Masyarakat miskin merupakan sekelompok orang yang kurang atau tidak memiliki akses untuk mendapatkan sumberdaya yang ada di masyarakat ataupun peluang lainnya sehingga tidak dapat dengan optimal mengembangkan diri dan kehidupannya. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan hidup misalnya tidak memiliki pekerjaan, kurang modal usaha, rendahnya akses pada sarana komunikasi, berperan dalam organisasi kemasyarakatan, dsb.

Proses individu, kelompok ataupun masyarakat menjadi miskin dapat dilihat dari tiga dimensi, yang sekaligus menjadi sebab munculnya fenomena kemiskinan, yaitu dimensi kultural, dimensi struktural, dan dimensi geografis. *Dimensi pertama* adalah kemiskinan disebabkan karena individu, kelompok atau masyarakat tertentu memiliki nilai, sikap dan perilaku malas, tidak disiplin, boros, tidak berorientasi pada prestasi dsb. Kemiskinan tersebut disebut kemiskinan kultural. *Dimensi ke dua*, kemiskinan yang disebabkan struktur sosial tertentu yang membatasi individu untuk mencapai kemajuan. Kemiskinan tersebut menyebabkan apa yang disebut kemiskinan struktural. *Terakhir*, kemiskinan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak memungkinkan orang untuk maju misal letak geografis yang terpencil, lahan kritis, dan di daerah pedalaman.

Penanggulangan masalah kemiskinan harus disertai juga dengan mengatasi masalah lainnya seperti pengangguran, kelaparan, konflik sosial dan perusakan lingkungan. Upaya untuk mengembangkan masyarakat miskin dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pengembangan peran organisasi lokal, pengembangan peran tokoh masyarakat, penciptaan lapangan usaha, pemberian bantuan modal dan kebijakan-kebijakan yang *pro-the poor*.

Program pendidikan nonformal termasuk program pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan dalam upaya memberdayakan warga masyarakat perlu dievaluasi secara akuantabel dan profesional. Evaluasi program pendidikan nonformal didefinisikan sebagai kegiatan sistematis

untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data mengenai penyelenggaran aktivitas program pendidikan nonformal sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (Sudjana, 2006). Batasan evaluasi program ini mengandung beberapa hal penting yaitu kegiatan sistematis, data dan pengambilan keputusan.

Kegiatan sistematis mengandung makan bahwa evaluasi program dilakukan melalui prosedur yang tertib berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Data yang dikumpulkan, sebagai fokus evaluasi program, diperoleh melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dengan menggunakan pendekatan, model, metode dan teknik ilmiah. Pengambilan keputusan bermakna bahwa data yang disajikan itu akan bernilai apabila menjadi masukan berharga untuk proses pengambilan keputusan tentang alternatif-alternatif yang akan diambil terhadap program. Dengan demikian dapat dikatakan evaluasi program adalah kegiatan teratur dengan menggunakan kaidah ilmiah untuk memperoleh data yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Stufflebeam (Knowless, 1980) menjelaskan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk mencapai *proactive evaluation* untuk melayani pemegang keputusan, dan *retroactive evaluation* untuk keperluan pertanggungjawaban. Kirkpatrick (1994) menyebutkan bahwa evaluasi program dilakukan untuk menunjukkan kinerja program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memutuskan apakah dilanjutkan atau tidak suatu

program, dan memperoleh informasi bagaimana meningkatkan kinerja program di masa depan.

Sedangkan secara lebih lengkap dijelaskan oleh Sudjana (2006) bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk memberikan masukan untuk perencanaan program, memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan dan penghentian program, memberikan masukan untuk memodifikasi program, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program, memberikan motivasi dan pengarahan kepada para pengelola dan pelaksana program, dan memberikan masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program.

Evaluasi program dilakukan secara terencana dan mengikuti tahap-tahap tertentu, dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan evaluasi yang dilakukan. Untuk lebih memfokuskan kegiatan evaluasi, juga perlu ditentukan kepada bagian-bagian program mana yang akan dievaluasi. Hal ini menekankan pada penting penggunaan model evaluasi yang dipilih. Model evaluasi antara lain model dari Stufflebeam dengan *Context, Input, Process, Product* (CIPP) (Stufflebeam, 1986) dan model empat level dari Kirkpatrick (1994) yaitu *reaction, learning, behavior, and result*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang hasilnya dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Model

evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam (Stufflebeam, *et al.* 1986:117) dengan model CIPP-nya (*context, input, process, product*) untuk menganalisis penyelenggaraan program pendidikan nonformal bagi masyarakat miskin dalam rangka pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bulan Maret sampai dengan Oktober 2009. Sampel lokasi ditetapkan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Sampel satuan pendidikan, program pendidikan nonformal, dan responden telah ditetapkan secara bertujuan. Subjek analisis dalam penelitian ini adalah program-program pendidikan nonformal yang berbasis pada program pendidikan kecakapan hidup secara terintegrasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta seperti LSM.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan pengamatan dengan menggunakan kuesioner, serta pedoman wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman, 2007). Sementara itu, data yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif disajikan dalam tabel, grafik, dan diagram serta dianalisis secara statistik deskritif.

HASIL PENELITIAN

A. Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Di lapangan dapat dikenali beberapa program pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Program pendidikan kecakapan hidup itu antara lain adalah program keterampilan montir mobil, menjahit, produksi alat-alat *drumband*, pembuatan *souvenir* dari kayu, dan bekleding.

Program pendidikan keterampilan montir diselenggarakan selama dua puluh hari oleh PKBM Suka Makmur, desa Jetis, Kec. Saptosari, Gunung Kidul. Penyelenggaraan program ini dimaksudkan untuk membekali para pemuda di lingkungan sekitar dengan keterampilan yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai peluang dalam berusaha. Pemuda yang dimaksud adalah mereka yang putus sekolah dan/atau yang terlibat menjadi warga belajar program Paket C. Program ini merupakan program beasiswa yang bersumber dari APBD tingkat II. Jumlah peserta yang ikut kegiatan ini sebanyak 20 orang, dengan dua orang fasilitator pembelajaran.

Program pendidikan keterampilan menjahit dasar bertujuan untuk membekali warga belajar dengan keterampilan menjahit agar dapat meningkatkan pendapatan. Pentingnya program ini dilaksanakan juga disebabkan peluang usaha di wilayah sekitar cukup baik. Program pendidikan ini merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM di desa Kemadang, Tanjungsari, Gunung Kidul. Program pendidikan ini diikuti oleh

15 orang warga belajar yang direkrut dari warga desa sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan dan masih termasuk dalam usia produktif. Warga belajar mendaftarkan secara langsung ke penyelenggara program.

Program pendidikan kelompok belajar usaha (KBU) produksi alat-alat drum-band dilaksanakan pada tahun 2008 di Desa Caturharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul. Program ini bertujuan untuk membekali warga belajar untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan berwirausaha dalam rangka meningkatkan kehidupannya. Program ini didanai dari dana swadana (mandiri) PKBM Kyai Suratman dan menarik iuran dari warga belajar. Adapun sasaran program KBU ini adalah warga belajar program pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 10 orang, dimana 3 orang dari warga belajar adalah warga masyarakat bukan warga belajar paket B. Untuk membantu mengembangkan program ini, terdapat dua orang fasilitator pembelajaran yang direkrut secara interpersonal (informal) oleh pengelola.

Program keterampilan pembuatan souvernir kayu dilaksanakan oleh pemerintah desa Mangunan, atas bantuan dana hibah dari departeman tenaga kerja dan trasmigrasi. Program ini merupakan program yang direncanakan secara swadaya atas dasar kenyataan di masyarakat Mangunan bahwa banyak pengrajin kayu yang memproduksi pintu kayu namun secara ekonomi penghasilan mereka masih rendah karena harga jual produk mereka relative rendah. Hal ini yang mendorong pemerintah setempat untuk mengajukan proposal program ke depnakertrans guna menjalankan program yang dapat membekali kemampuan membuat produk keterampilan kayu yang berdaya

jual lebih besar dengan modal relative kecil. Program tersebut adalah pelatihan keterampilan pembuatan souvenir kayu.

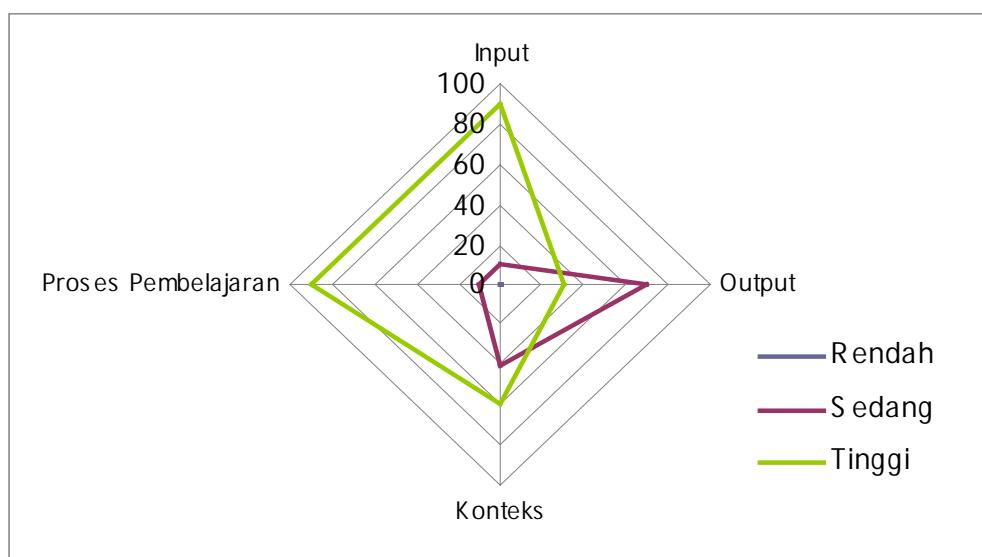
Program pendidikan keterampilan menjahit tingkat terampil diselenggarakan oleh PKBM Kec. Pengasih, Kulon Progo. Program ini bertujuan untuk membekali warga belajar dengan keterampilan menjahit yang lebih tinggi sesuai dengan permintaan lapangan pekerjaan. Kelompok sasaran program ini adalah warga masyarakat umum. Warga belajar program ini sebanyak 20 orang. Program pendidikan ini diselenggarakan selama tiga bulan dengan tiga kali pertemuan dalam seminggu.

Program pendidikan keterampilan pembuatan bekleding dilakukan pada tahun 2007 di desa Sanggrahan, Bendungan, Kulon Progo. Program kecakapan ini diselenggarakan atas dasar adanya peluang usaha pada bidang kerajinan pembuatan jok mobil, kursi, dan sebagainya. Keterampilan ini penting dikembangkan mengingat banyaknya permintaan masyarakat terhadap jasa di bidang ini. Program ini bertujuan untuk membekali para pemuda yang dipandang masih produktif dan mau berusaha (etos kerja) dengan keterampilan dalam pembuatan bekleding. Jumlah warga belajar yang direkrut adalah sepuluh orang, berasal dari wilayah sekitar.

B. Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan dapat dilihat pada grafik Kulon Progo (1) di bawah ini. Dari grafik itu dapat diketahui bahwa dilihat dari komponen masukan dan proses pembelajaran, pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten

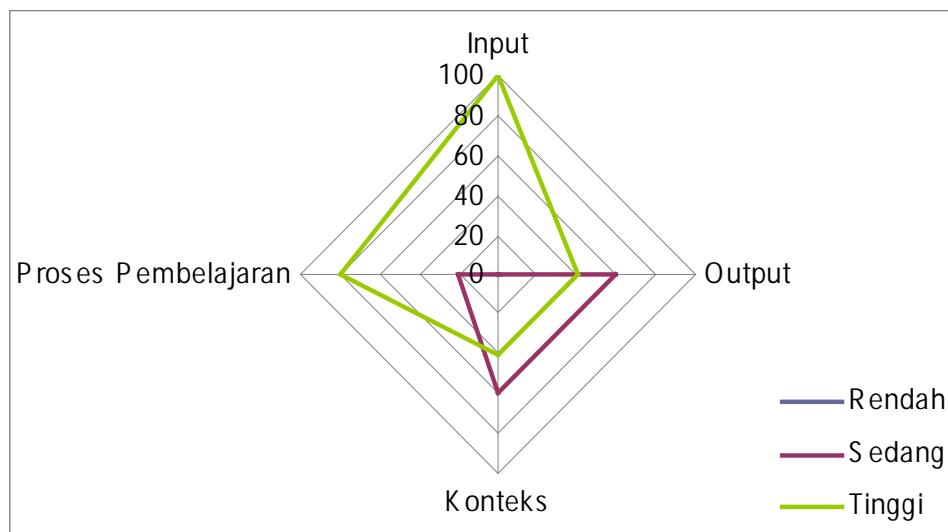
Kulon Progo telah berjalan baik. Namun, dilihat dari komponen keluaran hasil belajar dan dukungan lingkungan atau konteks masih menunjukkan tidak sebaik dalam komponen masukan dan proses pembelajarannya. Komponen keluaran hasil pendidikan cenderung sedang, demikian juga halnya untuk komponen lingkungan atau konteks meskipun antara kategori tinggi dan sedang persentasenya relatif tidak banyak berbeda.



Grafik 1. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup di Kab. Kulon Progo Menurut Pendidik

Apakah hal serupa itu terjadi juga dalam pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Gunung Kidul? Dari grafik Kabupaten Gunung Kidul (2) diketahui bahwa komponen masukan terlihat baik, demikian juga proses pembelajarannya. Tetapi, komponen keluaran hasil belajar dan konteks atau lingkungan masih menunjukkan keadaan sedang dengan perbandingan kategori sedang 60% dan kategori tinggi 40%. Kesimpulannya bahwa komponen peserta dan proses pembelajaran dalam kategori baik, namun belum

memberi kontribusi terhadap pencapaian keluaran hasil belajar dengan dukungan lingkungan yang memiliki kategori baik.

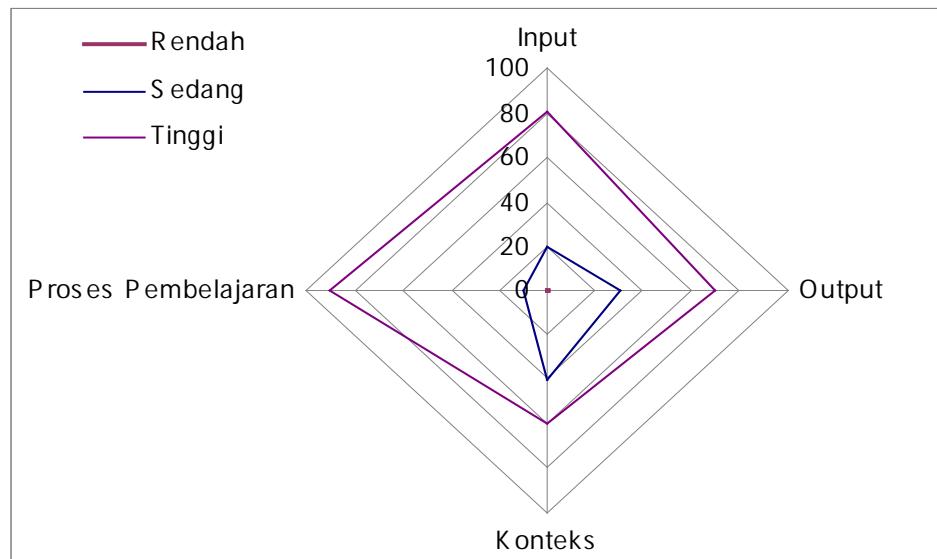


Grafik 2. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup
di Kab. Gunung Kidul Menurut Pendidik

Bagaimana pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Bantul? Apakah juga kondisinya memiliki kesamaan dengan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul? Data pada grafik Kab. Bantul (3) di bawah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kab. Bantul relatif lebih baik dibanding dua kabupaten sampel yang lain. Komponen masukan mencapai 80% baik, komponen proses pembelajaran mencapai 90% baik, komponen keluaran mencapai 70% baik, dan komponen konteks mencapai 60% baik.

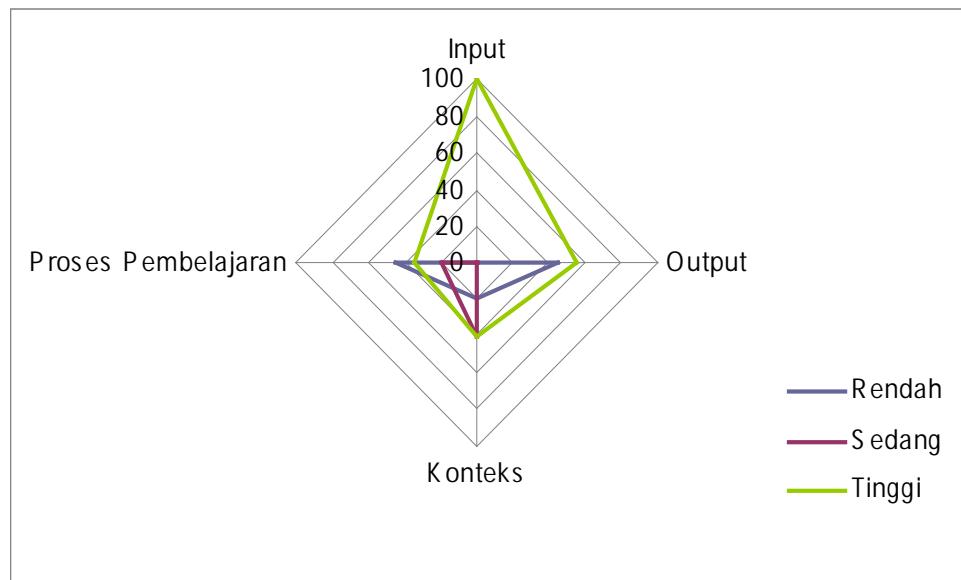
Meskipun demikian, bila dilihat pola umumnya maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa komponen masukan dan proses pembelajaran telah menunjukkan kondisi baik, namun masih belum diimbangi

oleh komponen keluaran dan konteks yang pada umumnya menunjukkan kondisi sedang.



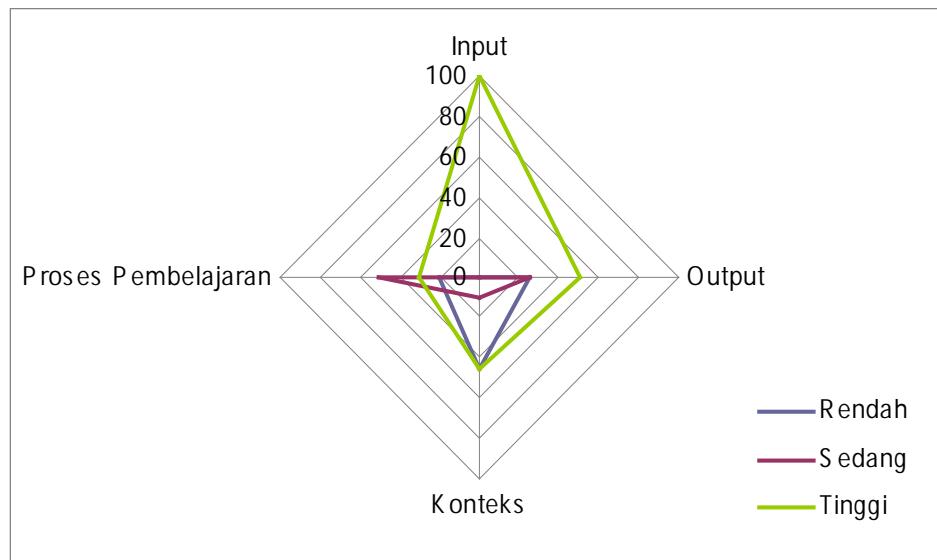
Grafik 3. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup
di Kab. Bantul Menurut Pendidik

Gambaran tersebut di atas tentang pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup yang meliputi seluruh komponen adalah gambaran menurut para pengelola atau tutor. Bagaimana pendapat peserta tentang pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup itu secara keseluruhan? Pendapat peserta tentang pendidikan kecakapan hidup di tiga kabupaten sampel dilihat menurut komponen disajikan pada grafik 4, 5, dan 6 di bawah ini.



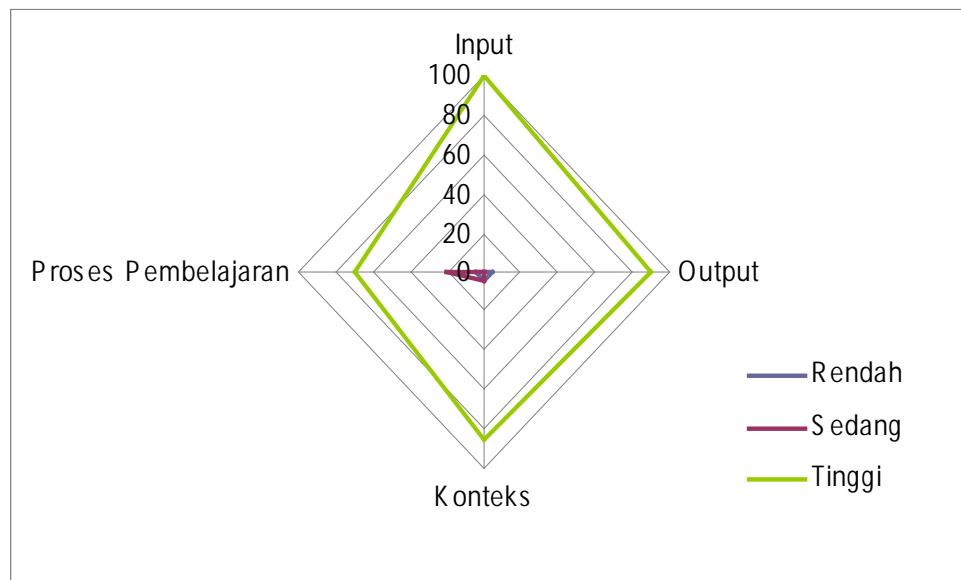
Grafik 4. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup di Kab. Kulon Progo Menurut Peserta

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dilihat dari komponen masukan berada pada kategori tinggi, komponen proses pembelajaran pada kategori rendah, demikian juga untuk komponen keluaran hasil belajar dan komponen konteks atau lingkungan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Kulon Progo menurut para peserta secara keseluruhan masih belum termasuk kategori baik, meskipun untuk komponen masukan sudah masuk pada kategori baik.



Grafik 5. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup di Kab. Gunung Kidul Menurut Peserta

Hal yang sama terjadi juga di Kabupaten Gunung Kidul. Melalui grafik di bawah ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dilihat dari komponen masukan sudah termasuk kategori baik, namun bila dilihat dari komponen proses pembelajaran, keluaran hasil belajar dan konteks atau lingkungan keadaannya masih belum tergolong baik, cenderung kategori sedang untuk proses pembelajaran dan bahkan kategori rendah untuk komponen konteks atau lingkungan. Kesimpulan umum yang dapat dikemukakan adalah bahwa pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Gunung Kidul dilihat menurut komponen tersebut di atas keadaannya masih menunjukkan belum kategori baik secara keseluruhan, masih memerlukan perbaikan pada tiga komponen lainnya yaitu komponen proses pembelajaran, keluaran hasil belajar dan lingkungan atau konteks.



Grafik 6. Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup di Kab. Bantul Menurut Peserta

Keadaan yang nampaknya relatif lebih baik terlihat pada pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Bantul seperti sajian data secara jelas pada grafik tersebut di atas. Menurut grafik itu, meskipun dengan persentase yang berbeda namun kondisi komponen masukan, proses pembelajaran, keluaran hasil belajar dan komponen konteks keempatnya menunjukkan persentase kategori baik sekitar 70% sampai 100%, walaupun ada sedikit persentase untuk komponen proses pembelajaran menunjukkan kategori 10% sedang dan untuk komponen keluaran hasil belajar 5% dalam kategori rendah.

Kesimpulan umum yang dapat dikemukakan adalah bahwa pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Bantul telah berjalan relatif lebih baik bila dibandingkan dengan dua kabupaten sampel yang lain yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul meskipun masih perlu juga

dilakukan perbaikan pada tiga komponennya yaitu komponen proses pembelajaran, keluaran hasil belajar, dan konteks atau lingkungan.

C. Penjalinan Kerja Sama

Informasi yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam melaksanakan pendidikan kecakapan hidup pada tiga kabupaten sampel yaitu: pemerintah pusat (depdikas dan depnakertrans), pemerintah kabupaten yang terdiri dari dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja, pemerintah desa (kalurahan), tokoh masyarakat, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), penilik pendidikan masyarakat, tutor, lembaga pendidikan kejuruan di tingkat kabupaten, dan perusahaan setempat.

Pemerintah pusat (depdiknas dan depnakertrans) mengalokasikan program dan dana untuk pendidikan kecakapan hidup di tingkat kabupaten. Pemerintah kabupaten melalui dinas terkait juga menyediaan dana APBD untuk kegiatan pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh masyarakat baik melalui PKBM maupun bukan. PKBM bertindak selaku pelaksana program yang didukung oleh tokoh masyarakat dan penilik dikmas untuk sosialisasi program dan perekutan peserta, tutor untuk melaksanakan pembelajaran, dan LPK setempat untuk kerjasama melaksanakan pembelajaran dan praktek keterampilan. Di tingkat desa, terdapat pemerintah desa yang melaksanakan pendidikan kecakapan hidup dengan dana yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Sementara itu, perusahaan setempat berperan sebagai mitra kerja melalui program magang atau penyaluran lulusan.

PEMBAHASAN

Salah satu pertanyaan kunci dalam melaksanakan evaluasi terhadap suatu program yang sedang berjalan adalah apakah program yang dilaksanakan itu telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan atau apakah program tersebut telah dilaksanakan secara efektif?

Evaluasi ini menemukan pola pelaksanakan pendidikan kecakapan hidup yaitu bahwa pengelolaan komponen masukan dan proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan kategori baik, namun belum menghasilkan keluaran hasil belajar dan manfaatnya yang juga baik dan diikuti oleh komponen lingkungan atau konteks yang juga sama-sama kategori baik. Evaluasi ini menemukan juga bahwa pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo dilihat dari keseluruhan komponen yang dievaluasi yaitu komponen masukan, proses pembelajaran, keluaran hasil belajar, dan konteks atau lingkungan.

Tentu banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut antar lain: karakteristik program pendidikan kecakapan hidup itu sendiri yang ternyata lebih fokus sebagai pendidikan keterampilan, heterogenitas karakteristik kognitif warga belajar yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran, pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup belum memberikan kesempatan yang optimal kepada warga belajar untuk mendalami materi-materi pembelajaran, lembaga mitra yang ada hampir pada semua program kecakapan

hidup terbatas perannya sebagai penyedia narasumber dan penyedia peralatan praktek, setiap program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan menuntut kemandirian para lulusan untuk mempraktekan pengetahuannya, dan terkait dengan faktor di atas, adanya kekurangsiapan atau kekhawatiran lulusan untuk melakukan pekerjaan baru dimana tingkat kendala dan keberhasilannya belum dapat diketahui secara pasti.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terciptanya semua lulusan yang bekerja sehingga mampu meningkatkan kualitas hidupnya belum terjadi pada setiap program pendidikan kecakapan hidup yang diteliti. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksakan, para lulusan program mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha disebabkan minimnya bantuan modal, kekurangtahuan tentang peluang usaha, ketakutan gagal, dan ketidaktinginan berpisah dengan keluarga juga menjadi penyebab kekurangberhasilan penerapan kemampuan yang dimiliki. Hal ini nampak dari sedikitnya para lulusan yang mampu bertahan dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan kemampuan yang telah dipelajari baik pada program KBU pembuatan alat-alat drum band, pembuatan bekleding, dan menjahit, dimana sebagian besar lulusan kembali ke pekerjaan yang sebelumnya digeluti. Sementara itu, pada program pendidikan pembuatan souvenir kayu ditemukan kenyataan yang berbeda yaitu lulusan mengembangkan usaha mereka sesuai dengan keterampilan yang dimiliki secara berkelompok.

Dengan demikian, berdasarkan pada temuan ini, perencanaan program perlu mempertimbangkan berbagai dampak lanjutan dari program

yang dilakukan bukan semata-mata membekali warga belajar dengan kemampuan sesuai hasil pembelajaran, tetapi membangun kondisi yang menunjang keberhasilan pemanfaatan hasil belajar warga belajar sehingga peningkatan kualitas ekonomi yang semula pada tataran individu mengembang secara cepat dan tepat sasaran pada tataran masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, masalah kemiskinan yang dihadapi dapat teratasi secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan program pendidikan melibatkan pihak-pihak berkepentingan baik internal yaitu warga belajar, dan penyelenggara/pengelola, dan pihak eksternal yaitu tokoh masyarakat setempat, pendidik (LPK), penguasa (pendidik), pemerintan dan penilik dikmas setempat. Dari segi kuantitas, pihak berkepentingan yang terlibat hampir pada setiap program masih relatif sedikit. Pada tahap perencanaan, semua program pendidikan yang diteliti belum melibatkan warga belajar secara aktif. Warga belajar atau kelompok sasaran dalam tahap perencanaan program belum dilibatkan terutama dalam pengkajian kebutuhan pendidikan yang dipandang oleh mereka merupakan sesuai yang sangat dibutuhkan, yang dirasakan oleh dirinya. Ketiadaan keterlibatan warga belajar akan mempengaruhi pada sikap dan motivasi mereka dalam proses pelaksanaan program. Pada tahap pelaksanaan, peran penting dilakukan oleh penyelenggara/pengelola dan pihak mitra (LPK) baik perorangan maupun lembaga sebagai penyedia pendidik/narasumber teknis, dan penyedia peralatan praktik. Mitra belum dapat memfasilitasi optimal dalam pemagangan, menghadirkan narasumber pengusaha sukses,

atau kunjungan ke sentra industri kerajinan, dll untuk memberikan pengalaman-pengalaman belajar kepada warga belajar yang lebih variatif dan mendukung keberhasilan belajar.

Sedangkan pada tahap evaluasi, pendidik (dari LPK) berperan dalam menilai hasil belajar warga belajar dengan berkoordinasi dengan dinas setempat, dan didukung oleh penyelenggara/pengelola. Peran lain penilik adalah memonitoring selama berlangsung kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hal ini dapat dikemukakan bahw guna terciptanya pengakuan yang baik dari pihak pengguna atau masyarakat luas, idealnya pengevaluasian pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dibentuk, kebermanfaatan evaluasi, dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten misalnya memiliki keahlian dan kewenangan dalam penentuan standar kelulusan dan prosedur tes.

Berdasarkan hal di atas, program kecakapan hidup perlu diselenggarakan dengan sistematis dan bukan secara asal berjalan. Maka, pemahaman dan keberhasilan penyelenggara/pengelola dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain merupakan aspek penting. Identifikasi terhadap setiap stakeholder secara cermat menjamin kemudahan dalam pelaksanaan program pendidikan. Dengan demikian, pengelola dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menganalisis kemungkinan, kesempatan dan hambatan dalam bermitra dengan perseorangan atau lembaga. Hal ini dikarenakan keberadaan pihak berkepentingan terhadap program pendidikan kecakapan

hidup dapat menjadi sulit diperoleh dan sangat terbatas padahal kehadiran mereka merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan pengembangan model penyelenggaraan program kecakapan hidup yang dapat dijadikan acuan waktu mendatang, sebagaimana berikut ini:

Pada tahap pra pelaksanaan, perlu dilakukan kegiatan yang mencakup:

1) pengidentifikasi kebutuhan dilakukan bersama-sama dengan kelompok sasaran, 2) didukung oleh data relevan dan obyektif; 2) kebutuhan pendidikan mempertimbangkan relevansi dengan lapangan pekerjaan; 3) seleksi warga belajar dilakukan lebih mempertimbangkan berbagai aspek seperti minat, motivasi, dan komitmen warga belajar; 4) penentuan pendidik mempertimbangkan kompetensi dan komitmennya; 5) fasilitas pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kesesuaian, kelengkapan, dan kemudahan dalam penggunaannya; 6) materi pembelajaran disusun sesuai dengan tujuan program, menantang, dan terintegrasi antar materi dan dengan kehidupan warga masyarakat, dan 7) sebelum pelaksanaan program, penilaian terhadap tahap persiapan perlu dilakukan secara cermat.

Pada tahap pelaksanaan perlu dilakukan kegiatan yang mencakup: 1) proses pembelajaran dilakukan dengan cara-cara (metode) yang variatif baik bersifat teori maupun praktik; 2) pembelajaran dilakukan dengan menekankan prinsip ketuntasan (*mastery learning*); 3) iklim pembelajaran dilakukan dalam suasana keakraban dan kesetaraan; 4) pemanfaatan sumber-sumber belajar

yang layak digunakan yang ada di masyarakat; 5) layanan pengembangan edukatif warga belajar perlu dikembangkan; dan 6) penilaian terhadap semua kegiatan tersebut perlu diselenggarakan.

Pada tahap pasca pelaksanaan perlu dilakukan kegiatan yang mencakup: 1) penilaian hasil belajar dilakukan dengan prinsip relevansi dan obyektivitas; 2) penilaian hasil pembelajaran menggunakan data yang akurat dan instrumen yang valid dan reliabel; 3) terkait dengan hal ini (2), penilaian perlu dilakukan bekerja sama dengan pihak lain yang kompeten untuk menjamin kebermutuan lulusan bukan sekedar formalitas semata; 4) dukungan material dan/atau moral dilakukan guna mengembangkan sikap kemandirian dari para lulusan dalam mempraktekan kemampuan yang dimilikinya; 5) terkait dengan dengan (4), jaringan kerja sama dengan mitra yang berperan sebagai donatur, pembimbing, pendamping, penerima tenaga kerja, dll perlu dilakukan; 6) membentuk atan mengembangkan wadah-wadah sosial yang memiliki fungsi pemberdayaan, yang mana dapat digunakan sebagai tempat pembinaan, pengembangan usaha dan saling bertukar pengetahuan, dan 7) penilaian terhadap semua kegiatan ini perlu diselenggarakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup pada semua kabupaten sample sudah berjalan cukup baik dilihat dari komponen konteks, input, proses, dan produk. Namun, pada komponen dampak, sebagian besar lulusan belum dapat

mempraktekkan kompetensi yang telah dimiliki pada dunia kerja/usaha karena berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan baik yang berasal dari warga belajar, proses pembelajaran, dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup belum semua dapat optimal mengurangi/mengatasi tingkat kemiskinan secara cepat, menyeluruh dan bermanfaat. Selain itu, keberhasilan pencapaian dipengaruhi oleh sinergitas pihak berkepentingan dalam penyelenggaraan program pendidikan. Dalam penyelenggaraan program kecakapan hidup menggambarkan bahwa sinergitas dan keterlibatan para pihak masih terbatas perannya dalam penyelenggaraan program pembelajaran. Oleh karena itu, penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup perlu dilandasi pemikiran bahwa program harus menghasilkan lulusan berkualitas, pembelajaran berorientasi pasar, dan program bermanfaat besar bagi individu dan masyarakat sehingga tahap-tahap penyelenggaraan program perlu dilakukan secara berkualitas.

SARAN-SARAN

Sehubungan dengan hal di atas, saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) penyelenggaraan program kecakapan hidup perlu dilakukan dengan mengintegrasikan program-program pendidikan kecakapan hidup dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan warga belajar, 1) penentuan kelompok Sasaran perlu dilakukan dengan cara selektif , 3) dalam proses pembelajaran, pengalaman-pengalaman belajar perlu disediakan sehingga

memungkinkan warga belajar secara utuh dan optimal mengembangkan kompetensinya, 4) Kemitraan dengan pihak-pihak berkepentingan perlu dilakukan secara variatif dalam hal bidang kerja sama dan berkelanjutan bukan hanya sebatas pada penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup sesuai jangka waktu tertentu, dan 5) Pemanfaatan wadah-wadah kegiatan sosial ekonomi baik yang sudah ada di masyarakat atau wadah-wadah baru yang dibentuk perlu dilakukan guna memfasilitasi warga belajar dalam mengembangkan peningkatan kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, P.H, & Manzoor Ahmed. (1974). *Attacking Rural Poverty, How Nonformal Education Can Help*. London: The John Hopkins University Press.
- Hoppers. (2006). *Nonformal Education: Five Point of Views*. www.eric.ed.gov
- Kirkpatrick, Donal L. (1994). *Evaluating Training Program*. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher.
- Knowless, Malcolm S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education*. New York: The Adult Education Company.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael,. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Stufflebeam, et al. (1986). *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Sudjana, D. (2001). *Pendidikan nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Pendukung serta Asas*, Bandung: Falah Production
- Sumarno. (2007). *Pemetaan Tingkat Fasilitasi Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, FIP UNY Yogyakarta.